

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP BELANJA DAERAH DENGAN JUMLAH
PENDUDUK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

**Peminatan:
Akuntansi Perpajakan**



Diajukan oleh:
ALDO BAGUS NUGROHO
NIM. 1922100024

**FAKULTAS EKONOMI DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS WIDYA DHARMA
KLATEN
Juni 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP BELANJA DAERAH DENGAN JUMLAH
PENDUDUK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2021**

Diajukan oleh:

ALDO BAGUS NUGROHO

NIM.1922100024

Telah disetujui Pembimbing untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi

Universitas Widya Dharma

Pada tanggal 07 Juni 2023

Pembimbing Utama



Dandang Setyawanti, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIDN. 0619076801

Pembimbing Pendamping




Susvanti, S.E., M.Si.

NIDN. 0610048105

Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi



Agung N. Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA.

NIDN. 0620017001

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP BELANJA DAERAH DENGAN JUMLAH
PENDUDUK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2021**

Diajukan oleh:

ALDO BAGUS NUGROHO

NIM.1922100024

Telah dipertahankan di hadapan Dewan/Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Psikologi Universitas Widya Dharma dan diterima untuk
memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Pada tanggal 20 Juni 2023

Ketua

Dr. Arif Julianto S.N., M.Si

NIDN. 0610077201

Sekretaris

Agung N. Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA.

NIDN. 0620017001

Anggota

Dandang Setyawanti, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIDN. 0619076801

Anggota

Susyanti, S.E., M.Si.

NIDN. 0610048105

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Psikologi



Dr. Arif Julianto S.N., M.Si.

NIDN. 0610077201

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldo Bagus Nugroho

NIM : 1922100024

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Psikologi

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul: **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021”** adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas plagiat. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi ini telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan Ijazah dan pencabutan gelar yang saya peroleh dari karya skripsi ini.

Klaten, 09 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Aldo Bagus Nugroho

MOTTO

“Ketakutan adalah penjara bernama kegagalan. Taklukkanlah rasa takut karena sukses adalah hak pemberani.”

(Jefri Al Buchori)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang-orang terkasih berikut ini.

1. Kedua orang tua, Bapak Maryanto dan Mama Sri Winarti yang senantiasa mendoakan, memberikan nasihat, bimbingan, motivasi, dan yang selalu memberikan kasih sayang serta menguatkan, terima kasih atas semuanya.
2. Kakakku, Dewi Nur Chayawati yang selalu memberikan dukungan serta memberi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Erlin Pujianti, terima kasih atas semangat, bantuan, dan dukungannya serta selalu mendampingi hingga selesainya penelitian ini.
4. Teman seperjuangan, Akuntansi Angkatan 2019, terima kasih atas semua kenangan yang sudah kita lalui bersama selama ini.
5. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu yang telah berpartisipasi dalam membantu menyelesaikan penelitian ini.
6. Almamater tercinta, Universitas Widya Dharma Klaten.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas ke hadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021”**.

Adapun maksud disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Psikologi Universitas Widya Dharma Klaten. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan yang ada pada diri peneliti.

Selama penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak mendapat arahan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut ini.

1. Bapak Prof. Dr. Triyono, M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Dharma Klaten.
2. Bapak Dr. Arif Julianto S.N., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Psikologi Universitas Widya Dharma Klaten.
3. Bapak Agung Nugroho Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Widya Dharma Klaten.

4. Ibu Dandang Setyawanti, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing Utama yang sudah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Susyanti, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Widya Dharma Klaten, terima kasih atas bekal ilmu yang sudah diberikan selama masa pembelajaran berlangsung.
7. Kedua orang tua, Bapak Maryanto dan Mama Sri Winarti yang senantiasa mendoakan, memberikan nasihat, bimbingan, motivasi, dan yang selalu memberikan kasih sayang serta menguatkan, terimakasih atas semuanya.
8. Kakaku, Dewi Nur Chayawati yang selalu memberikan dukungan serta memberi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Erlin Pujianti, terima kasih atas semangat, bantuan, dan dukungannya serta selalu mendampingi hingga selesainya penelitian ini.
10. Keluarga besar yang sudah mendukung dan memberikan semangat.
11. Teman seperjuangan, Akuntansi Angkatan 2019, terima kasih atas semua kenangan yang sudah kita lalui bersama selama ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu yang telah berpartisipasi dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi.

Semoga kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT atas kebaikan pihak-pihak terkait yang dengan ikhlas memberikan doa, semangat, bantuan, dan bimbingannya. Meskipun masih jauh dari kata sempurna, diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Aamiin.

Klaten, Juni 2023

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Pajak	9
2. Pajak Daerah.....	9
3. Retribusi	11
4. Retribusi Daerah.....	12
5. Belanja Daerah	13
6. Jumlah Penduduk.....	14
B. Penelitian Terdahulu	15
C. Pengembangan Hipotesis dan Hipotesis Penelitian	17
1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah	17
2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah	19

3.	Jumlah Penduduk Memoderasi Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah	20
4.	Jumlah Penduduk Memoderasi Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah	21
D.	Model Penelitian	22
BAB III	25
METODE PENELITIAN	25
A.	Metode Penelitian	25
1.	Populasi dan Sampel.....	25
2.	Data dan Sumber Data.....	26
3.	Teknik Pengumpulan Data	26
4.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	27
B.	Metode Analisis Data.....	29
1.	Uji Statistik Deskriptif.....	29
2.	Uji Asumsi Klasik	30
3.	Uji Hipotesis.....	32
BAB IV	35
PEMBAHASAN	35
A.	Deskripsi Objek Penelitian.....	35
B.	Uji Statistik Deskriptif	35
C.	Uji Asumsi Klasik.....	37
1.	Uji Normalitas	37
2.	Uji Multikolinearitas	38
3.	Uji Heteroskedastisitas	39
4.	Uji Autokorelasi	40
D.	Uji Hipotesis	41
1.	Analisis Regresi Linear Berganda	41
2.	<i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	42
3.	Uji F (Simultan).....	43
4.	Uji t (Parsial)	44
5.	Koefisien Determinasi (R ²).....	45
E.	Pembahasan.....	46
BAB V	52
SIMPULAN DAN SARAN	52
A.	Simpulan	52
B.	Saran	53

DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan	5
Tabel 4.1	Daftar Nama Sampel	35
Tabel 4.2	Hasil Statistik Deskriptif	36
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas	38
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinearitas	39
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi	40
Tabel 4.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas	40
Tabel 4.7	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	41
Tabel 4.8	Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i>	42
Tabel 4.9	Hasil Uji Simultan (Uji F)	44
Tabel 4.10	Hasil Uji Parsial (Uji-t)	44
Tabel 4.11	Hasil Uji Determinasi	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian	24
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Nama Sampel
- Lampiran 2 Data Penelitian
- Lampiran 3 Hasil Analisis Data Penelitian Menggunakan Program *Statistical Package for Sosial Sciences* (SPSS) IBM. 25.0
- Lampiran 4 Analisis Rata-Rata
- Lampiran 5 Titik Persentase Distribusi t

ABSTRAK

Aldo Bagus Nugroho. NIM 1922100024. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Psikologi. Universitas Widya Dharma Klaten. “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021”.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah dengan jumlah penduduk sebagai variabel pemoderasi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota tahun 2019-2021. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 105. Pemilihan sampel menggunakan metode *sensus sampling*. Metode analisis data yang digunakan antara lain uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, uji hipotesis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA), uji F (simultan), uji t (parsial), dan uji determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi jawa tengah. Untuk pengujian dengan model *Moderated Regression Analysis* (MRA) diperoleh hasil jumlah penduduk tidak mampu memoderasi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah, Jumlah Penduduk

ABSTRACT

Aldo Bagus Nugroho. NIM 1922100024. Thesis. Accounting Study Program, Faculty of Economics and Psychology. Widya Dharma University, Klaten. "The Effect of Regional Taxes and Regional Retribution to Regional Expenditures with Population as Moderating Variable in Regency/City Regional Governments in Central Java Province in 2019-2021".

This study aims to examine the effect of regional taxes and regional retribution to regional expenditures with population as a moderating variable in regency/city regional governments in Central Java Province in 2019-2021. The population in this study is the regency/city regional government in the Central Java Province which consists of 29 regencies and 6 cities in 2019-2021. The number of samples in this study was 105. The sample was selected using a census sampling method. Data analysis methods used include descriptive statistical tests, classic assumption tests including normality tests, multicollinearity tests, autocorrelation tests, and heteroscedasticity tests, hypothesis testing using multiple linear regression analysis methods and Moderated Regression Analysis (MRA) tests, F (simultaneous) tests, t test (partial), and determination test. The results of this study indicate that regional taxes have a positive effect to regional expenditures. Meanwhile, regional retribution have no effect to regional expenditures on regency/city regional governments in Central Java Province. For testing with the Moderated Regression Analysis (MRA) model, the results show that the population is not able to moderate the effect of regional taxes and regional retribution to regional expenditures.

Keywords: Regional Taxes, Regional Retribution, Regional Expenditures, Population

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD).

APBD digunakan untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran atau pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan, mengukur evaluasi kinerja, serta sebagai alat koordinasi bagi semua aktivitas diberbagai unit kerja. Berdasarkan APBD tersebut, pemerintah dapat melakukan pengeluaran belanja daerah rutin tiap periodenya untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional dan program-program daerah agar daerah itu maju dan masyarakat sejahtera. Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah (Handayani *et al.*, 2022). Dalam penelitian ini belanja daerah dapat

diketahui melalui laporan realisasi APBD dengan menggunakan indikator belanja daerah per tahunnya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belanja daerah diantaranya penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semakin tinggi pajak daerah, maka semakin tinggi pula belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut.

Hasil penelitian Asih dan Irawan (2018), Febriyanti dan Mildawati (2017), Laksono dan Subowo (2014), serta Simanjuntak dan Ginting (2019) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah yang diterima menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki dana yang besar. Pemerintah daerah yang memiliki dana cukup besar menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut dapat membiayai belanja daerahnya sendiri dengan baik. Sedangkan hasil penelitian oleh Wahab *et al.* (2016) serta Yupukolo dan Erawati (2019) mengemukakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Tinggi rendahnya pajak daerah bukanlah salah satu ukuran yang mempengaruhi adanya belanja daerah. Perbedaan hasil penelitian tersebut menarik untuk diteliti kembali bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi belanja daerah adalah retribusi daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Semakin tinggi retribusi daerah, maka akan berpengaruh terhadap tingginya belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asih dan Irawan (2018), Febriyanti dan Mildawati (2017), serta Simanjuntak dan Ginting (2019) mengungkapkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Semakin tinggi retribusi daerah maka pendapatan yang diterima daerah tersebut juga akan tinggi sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja daerah tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahab *et al.* (2016) serta Laksono dan Subowo (2014) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Tinggi rendahnya retribusi daerah yang diterima tidak mempengaruhi tingkat belanja daerah suatu pemerintahan daerah. Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan ketidak konsistenan antara hasil peneliti satu dengan peneliti yang lainnya tentang pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah.

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, jumlah penduduk juga mampu mempengaruhi belanja daerah. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi

bertujuan untuk menetap. Jumlah penduduk yang tinggi dapat berdampak pada tingginya penerimaan daerah sehingga semakin besar pula belanja daerahnya.

Hasil penelitian Handayani *et al.* (2022), Januarti *et al.* (2022), serta Sanusi dan Yusuf (2018) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Jika terjadi peningkatan jumlah penduduk maka akan terjadi peningkatan pada belanja daerah pula. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajriati *et al.* (2021) mengatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadikan beban apabila struktur belanja daerah tersebut rendah. Serta persebaran dan mutunya juga akan rendah, sehingga banyak menuntut pelayanan sosial (Rahmadi *et al.*, 2018).

Dalam penelitian ini, jumlah penduduk digunakan sebagai variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah. Jumlah penduduk dipilih sebagai pemoderasi karena jumlah penduduk dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan pemerintah daerah dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan akan berpengaruh pula terhadap besar kecilnya dana yang dialokasikan untuk belanja daerah tersebut.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih ditemukan hasil yang tidak konsisten dari setiap variabel yang diuji. Dengan adanya ketidak konsistenan tersebut membuat peneliti yakin untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya variabel moderasi jumlah penduduk. Pemilihan pemerintah kabupaten/kota di wilayah

Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021 sebagai sampel peneliti disebabkan karena jumlah pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di antara provinsi yang mengapit antara Jawa Tengah yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur jumlah pendapatan daerah Jawa Tengah masih di bawah kedua Provinsi tersebut. (<https://bps.go.id>). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), besarnya jumlah realisasi penerimaan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut ini.

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan

	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
2019			
Pendapatan Daerah	36.037.894.762,46	25.859.780.138,00	33.455.209.328,00
Pendapatan Asli Daerah	21.244.266.598,02	14.437.914.236,00	19.327.125.485,00
Realisasi:			
Pajak Daerah	19.626.352.311,77	11.951.919.535,00	15.522.201.423,00
Retribusi Daerah	56.222.370,76	114.861.059,00	146.815.818,00
Dana Perimbangan	14.715.372.046,65	11.334.903.061,00	13.941.687.210,00
2020			
Pendapatan Daerah	34.504.275.699,00	25.393.735.935,00	31.631.024.772,00
Pendapatan Asli Daerah	18.521.882.174,00	13.668.282.279,00	17.950.996.509,00
Realisasi:			
Pajak Daerah	17.035.963.235,00	11.139.173.310,00	14.412.667.226,00
Retribusi Daerah	40.220.203,00	93.279.122,00	84.103.245,00
Dana Perimbangan	15.881.415.187,00	11.632.787.042,00	13.480.111.731,00
2021			
Pendapatan Daerah	36.991.873.000,00	26.763.751.300,00	34.280.707.261,00
Pendapatan Asli Daerah	20.333.680.000,00	14.975.030.288,00	18.935.883.965,00
Realisasi:			
Pajak Daerah	18.847.184.000,00	12.656.260.599,00	15.400.864.401,00
Retribusi Daerah	43.262.000,00	115.398.987,00	110.950.962,00
Dana Perimbangan	10.136.013.000,00	11.652.358.407,00	15.186.749.241,00

Sumber: Data APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Badan Pusat Statistik, 2022.

Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun

sebelumnya. Peningkatan anggaran pendapatan tersebut merupakan bentuk optimisme pemerintah di Provinsi Jawa Tengah terhadap kondisi ekonomi yang lebih baik pada tahun 2021. Hal tersebut akan mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah yang akan berimbas pula terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti meyakini melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diuji adalah sebagai berikut ini.

1. Apakah pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 - 2021?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 - 2021?
3. Apakah jumlah penduduk memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021?
4. Apakah jumlah penduduk memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap

belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut ini.

1. Untuk menguji apakah pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2019-2021.
2. Untuk menguji apakah retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2019-2021.
3. Untuk menguji apakah jumlah penduduk memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2019-2021.
4. Untuk menguji apakah jumlah penduduk memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2019-2021.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini.

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi pemerintah kabupaten/kota untuk hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor penentu

besar kecilnya belanja daerah yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah daerah khususnya di Provinsi Jawa Tengah mengenai penggunaan dana yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang dialokasikan untuk belanja daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah dengan jumlah penduduk sebagai variabel pemoderasi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah dengan jumlah penduduk sebagai variabel pemoderasi, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ini.

1. Pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021. Penerimaan pajak daerah merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah tersebut. Jika dana dari hasil penerimaan pajak daerah itu rendah, maka akan berdampak pada rendahnya dana yang dialokasikan untuk pembiayaan belanja daerah. Begitupun, jika dana yang diterima dari hasil penerimaan pajak daerah tinggi, maka dana yang dialokasikan untuk pembiayaan belanja daerah juga akan ikut tinggi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Asih dan Irawan (2018), Febrianti dan Mildawati (2017), Laksono dan Subowo (2014), serta Simanjuntak dan Ginting (2019) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021. Penerimaan daerah dengan retribusi daerah yang rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah, seharusnya setiap daerah meningkatkan pendapatan asli daerah melalui upaya baru

(ekstensifikasi) yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga akan mempengaruhi terhadap retribusi daerah tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Laksono dan Subowo (2014) serta Wahab *et al.* (2016) yang mengungkapkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

3. Jumlah penduduk tidak mampu memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021. Artinya jumlah penduduk yang tinggi maupun rendah tidak dapat menaikkan atau menurunkan jumlah anggaran belanja daerah suatu kabupaten/kota pada saat pemerintah daerah tersebut memiliki penerimaan pajak daerah yang besar untuk belanja daerah tersebut.
4. Jumlah penduduk tidak mampu memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021. Artinya jumlah penduduk yang tinggi maupun rendah tidak dapat menaikkan atau menurunkan jumlah anggaran alokasi belanja daerah suatu kabupaten/kota pada saat pemerintah daerah tersebut mempunyai penerimaan retribusi daerah yang besar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, dapat dikemukakan saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, terutama bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memperhatikan faktor pajak daerah dalam menentukan besar/kecilnya suatu belanja daerah, dimana faktor tersebut telah terbukti mempengaruhi alokasi dana anggaran belanja daerah.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat yang membayar pajak daerah, sebaiknya lebih taat dalam membayar kewajiban pajak daerahnya karena mampu mempengaruhi kondisi belanja daerah bagi pemerintah daerah. Dengan mempertimbangkan faktor tersebut, sehingga masyarakat dapat merasakan keuntungan di masa mendatang seperti semakin tersedia fasilitas-fasilitas umum seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sekolah yang mempunyai kualitas bagus sehingga memberikan rasa nyaman pada masyarakat dalam menjalankan kegiatannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap belanja daerah, seperti lain-lain pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmarian, H., Paramita, P. D., dan Ariesta, M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dengan Luas Wilayah sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus pada DPPD Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2013-2016). *Journal of Accounting*. 5 (5): 1-18.
- Asih, S., dan Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*. 5 (2): 177-191
- Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten-Kota Se-Jawa Barat 2019-2021 <https://jabar.bps.go.id>. Diakses tanggal 11 Januari 2023.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten-Kota Se-Jawa Tengah 2019-2021 <https://jateng.bps.go.id>. Diakses tanggal 11 Januari 2023.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten-Kota Se-Jawa Timur 2019-2021 <https://jatim.bps.go.id>. Diakses tanggal 11 Januari 2023.
- Fajriati, M., Zulfatunnisa, Z., Wafa, D. R., Heryaningrum, R. A., dan Anwar, S (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Barat. *Wacana Publik*. 15 (02): 75-85.
- Fatur. 2022. Punya APBD Tertinggi, Berikut 10 Provinsi Terkaya di Indonesia. <https://dialeksis.com/aceh/punya-apbd-tertinggi-berikut-10-provinsi-terkaya-di-indonesia/>. Diakses tanggal 25 Februari 2023.
- Febriyanti, V., dan Mildawati, T. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*. 6 (12): 1-17
- Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Handayani, A. T., Suryati, T., Marsela, H. A., Luqmana, D., dan Anwar, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *SOROT*. 17 (1): 41-57.

- Januarti, R., Wulandari, S., Prasasti, S., Yanto, F., dan Anwar, S. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Cafeteria*. 3 (1): 1-13.
- Laksono, B. B., dan Subowo, S. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis Journal*. 3 (4): 457-465. Mooy, P. C. A., dan Rahayu, Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*. 8 (11): 1-19.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-58-tahun-2005-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah/--376-490-PP58_2005.pdf. Diakses tanggal 08 Januari 2023.
- Rahmadi, Y., dan Harahap, E. F. (2020). Analisis Data Panel: Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Barat. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*. 17 (3).
- Sanusi, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2013-2015. Pendekatan Panel *Regression*. 3 (1): 50-56.
- Simanjuntak, A., dan Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. *Jurnal manajemen*. 5 (2): 183-194.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>. Diakses tanggal 08 Januari 2023.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. <https://jdih.go.id/files/4/2009uu028.pdf>. Diakses tanggal 08 Januari 2023.
- Wahab, A. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*. 1 (3): 35-47.
- Yupukolo, K. Y., dan Erawati, T. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012-2017. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*. 1 (2): 242-251.